

IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU
MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN
“GRINDULU MAPAN”

(Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

WAHYUDI MUHAMMAD ABDAR
NPM : 0841010022

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

2012

IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PACITAN “GRINDULU MAPAN”
(Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)

Oleh :

WAHYUDI MUHAMMAD ABDAR
NPM. 0841010022

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal : 12 Desember 2012

Pembimbing

Tim Penguji :

1. Ketua

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP : 196704061994032001

DR. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2. Sekretaris

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

3. Anggota

Drs. Ananta Pratama, M.Si
NIP. 196004131990031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dra. Ec. Hj Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PACITAN “GRINDULU MAPAN”
(Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)

Nama Mahasiswa : Wahyudi Muhammad Abdar

NPM : 0841010022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah direvisi dan disahkan

Pada Tanggal : 20 Desember 2012

Mengetahui / Menyetujui,

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dosen Penguji III

DR. Lukman Arif, M. Si
NIP. 196411021994031001

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

Drs. Ananta Pratama, M.Si
NIP. 196004131990031001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PACITAN “GRINDULU MAPAN”
(Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan)

Disusun Oleh :

Wahyudi Muhammad Abdar
NPM. 0841010022

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

Mengetahui,
DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 195507181983022001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul Implementasi Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” (Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Sri Wibawani, M.si sebagai dosen pembimbing. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini diantaranya :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. DR. Lukman Arif, MSi, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Budiono selaku penanggung jawab pelaksana program Grindulu Mapan
4. Orang tua saya yang memberikan doa dan kasih sayang selalu.

5. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan skripsi penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, 20 Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Revisi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Abstraksi.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Konsep Kebijakan Publik.....	13
a. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	16
b. Tujuan Kebijakan.....	17
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
a. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	17
b. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan.....	19
c. Aktor-aktor Implementasi Kebijakan.....	21
d. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan.....	22
e. Model Implementasi Kebijakan Michael Lipsky.....	24
3. Konsep Dasar Kemiskinan.....	28
a. Pengertian Kemiskinan.....	29
b. Indikator Kemiskinan.....	31
c. Penyebab Kemiskinan.....	32

d. Bentuk – bentuk Kemiskinan.....	35
4. Penanggulangan Kemiskinan.....	36
5. Kesejahteraan Masyarakat.....	36
a. Definisi Kesejahteraan.....	36
b. Kriteria Kesejahteraan.....	37
c. Tujuan Kesejahteraan Sosial.....	40
d. Indikator Kesejahteraan.....	41
e. Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial	41
6. Makna dan Slogan Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan.....	44
C. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III. Metode Penelitian.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	52
E. Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data.....	55
G. Keabsahan Data.....	56
BAB IV. Hasil dan Pembahasan.....	59
A. Diskripsi Tempat Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.....	59
2. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pacitan.....	60
a. Visi Kecamatan Pacitan.....	60
b. Misi Kecamatan Pacitan.....	62
c. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pacitan.....	63
3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pacitan.....	67
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pacitan.....	68
5. Karakteristik Pegawai.....	76
6. Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” Pemberian Beras Gratis Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).....	79

B. Hasil Penelitian.....	80
C. Pembahasan.....	93
 BAB V. Kesimpulan dan Saran.....	 102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAKSI

WAHYUDI MUHAMMAD ABDAR, IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN “GRINDULU MAPAN” (STUDI KASUS “GRINDULU MAPAN” KEBUTUHAN BERAS DI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN)

Di lihat dari tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Pacitan, tengah menghadapi persoalan yang cukup kompleks. berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya untuk mengatasi masalah ini dengan cara melaksanakan Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” (studi kasus “Grindulu Mapan” kebutuhan beras di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelian ini adalah 1. Kesesuaian data penerima beras gratis sesuai dengan data rumah tangga sangat miskin Grindulu Mapan kebutuhan Beras sesuai dengan data yang di keluarkan Pemda Kab. Pacitan. 2. Kesesuaian jumlah beras gratis Grindulu Mapan yang diterima RTSM, 3. Kelayakan beras Grindulu Mapan untuk dikonsumsi, 4. Kesesuaian waktu pemberian beras gratis Grindulu Mapan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif. Keabsahan data pada penelitian ini meliputi credibility (derajat kepercayaan); transfer ability (keteralihan); dependability (ketergantungan); confrimability (kepastian).

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Jumlah data penerima beras gratis program Grindulu Mapan telah sesuai dengan jumlah RTSM yang ditetapkan yaitu 267 RTSM. 2. Jumlah beras gratis yang diterima dalam program Grindulu Mapan telah sesuai dengan ketentuan dengan yang ditetapkan yaitu 15kg/RTSM/bulan atau ketentuan. 3. Kelayakan beras Grindulu Mapan untuk dikonsumsi oleh warga sudah sesuai kelayakan untuk dikonsumsi. 4. Kesesuaian waktu pembagian beras gratis program Grindulu Mapan belum konsisten dalam pelaksanaanya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Kesesuaian data penerima beras gratis sesuai dengan data RTSM penerima beras gratis “Grindulu Mapan” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 267 RTSM, sesuai dengan yang di usulkan, sesuai yang tetapkan Serta yang membutuhkan. 2. Kesesuaian jumlah beras gratis Grindulu Mapan yang diterima RTSM berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni 15kg/RTSM telah sesuai. 3. Kelayakan beras Grindulu Mapan untuk dikonsumsi oleh RTSM yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah sesuai kelayakan untuk di konsumsi. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan asupan energi untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. 4. Kesesuaian waktu pemberian beras gratis Grindulu Mapan yang ketentuannya adalah 15kg/RTSM/bulan belum sesuai atau belum konsisten dalam pemberian.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan masyarakat, Grindulu Mapan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universal Declaration of Human Right (1948) menyatakan bahwa pangan adalah salah satu hak azasi manusia. Indonesia termasuk negara yang menandatangani Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996 tentang hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup dan perlunya aksi bersama untuk mengurangi kelaparan. Millennium Development Goal (MDGs) juga menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Di Indonesia, 95% dari jumlah penduduk mengkonsumsi beras sebagai pangan utamanya. Dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia dan rata-rata konsumsi beras yang tinggi mencapai 139,42kg/jiwa/tahun (BPS, 2009) maka Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar untuk menjaga stabilitas perberasan nasional.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 telah mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan angka kemiskinan ini. Salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat, adalah naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan. Sementara itu, produksi pangan tidak

banyak mengalami perubahan dari kondisi swasembada beras yang telah dicapai pada era Orde Baru, meskipun ongkos produksi beras juga ikut naik (Daniel Dalle Sulekale, 2003). Hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat. Oleh sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setiap negara mempunyai pandangan maupun persepsi berbeda dalam hal bentuk tolak ukur kemiskinan maupun ukuran kemiskinan. Artinya, pengkategorian kemiskinan antara suatu negara dengan negara yang lain bisa berbeda.

Dalam tataran ukuran, menurut persepsi beberapa pakar, kemiskinan adalah bentuk kehidupan yang berada di bawah standar atau tingkat kesejahteraan. Menurut Sajogyo (1987), kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan, yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Sedangkan kemiskinan menurut Perbup Pacitan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.

Menurut pandangan sejarah ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh eksploitasi dan akibat imprealisme kolonial. Berdasarkan analisis hubungan sentral dengan periferi, terdapat adanya pola hubungan imperialistik yang asimetris yang terus menerus antara “pusat kekuasaan” dengan “periferi”, maka terjadilah ketimpangan penguasaan sumber-sumber yang di-“ideologikan” lewat pe-manfaatan komparatif (the law comparative advantage).

Hubungan imperialistic terjadi juga antara kelompok kecil masyarakat yang berada di pusat kekuasaan dengan masyarakat yang berada di pinggiran. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa orang miskin terjadi karena eksploitasi (they are poor because they are exploited) oleh suatu struktur lewat mekanisme interaksi vertikal maupun interaksi struktur feodal. (Sumber kutipan : Mashoed Dr.Msi, 2004, Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Membuka Kawasan Terisolasi, Surabaya : Papyrus. Hal 69).

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat, melalui 3 (tiga) kluster, yakni : program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, dimana progam raskin termasuk di dalamnya, kemudian program pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Usaha mikro dan kecil, hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui program tersebut, pemerintah mentargetkan angka kemiskinan akan menurun seberas 7,5 % pada tahun 2015. Sejalan dengan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, maka berimplikasikan terhadap jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

(RTS-PM) Program Raskin akan semakin menurun pada tahun yang akan datang.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori Bottom-Up. Dalam hal ini pemerintah berharap pada masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin.

Program Raskin (Program Beras untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program pemerintah. Program ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK). Sejak krisis pangan tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Seluruh Kementrian/Lembaga (K/L) terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program ini, sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program Raskin.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011, ditetapkan subsidi pangan (Raskin 2011) dengan sasaran meliputi 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi 15kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600/kg di Titik distribusi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 terdapat 31,02 juta orang miskin (13,33%) sedangkan pada tahun 2011 terjadi sedikit penurunan yakni terdapat 30,01 juta orang miskin (15,72%), Kelompok masyarakat ini memiliki kemampuan paling lemah dalam mengakses kebutuhan pangan, sekalipun produksi beras nasional surplus. Pemerintah memberikan bantuan subsidi beras melalui Program raskin tidak hanya terhadap masyarakat sangat miskin dan miskin, akan tetapi juga masyarakat yang hampir miskin.

Di lihat dari tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Pacitan, tengah menghadapi persoalan yang cukup kompleks. berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kabupaten Pacitan sendiri merupakan Kabupaten dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) terendah di Jawa Timur yaitu Rp 750.000,- setelah Kabupaten Ponorogo (Rp 745.000,-) hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari guna terciptanya suatu bentuk kesejahteraan sosial.

Tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Berdasar Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, tercatat sebanyak 44.059 RTM, namun tahun ini meningkat menjadi 48.619 RTM. Data terbaru RTM di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sasaran berdasar PPLS tahun 2011 tersebut selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan program-program perlindungan sosial, baik oleh lembaga pusat maupun daerah, salah satunya adalah program beras untuk warga miskin (raskin) dari pusat yang selama ini sudah berjalan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah meluncurkan program perlindungan sosial sejenis, diberi nama Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan atau disingkat “Grindulu Mapan”, sebagaimana yang telah di jelaskan pada Peraturan Bupati Pacitan nomor 14 tahun 2012 tentang Gerakan Terpadu Menyejahterakan Pacitan “Grindulu Mapan”.

Program Grindulu Mapan merupakan pengembangan dari program Raskin yang sudah ada akan tetapi untuk rumah tangga sasaran diutamakan yang sangat miskin. Rumah tangga dimaksud benar-benar yang tidak berdaya secara ekonomi, meski hanya sekedar menebus jatah beras miskin bersubsidi sebesar Rp.1.600 dari Rp.6.600/kg dari pemerintah mereka tidak mampu, dalam hal ini masyarakat yang menerima bantuan ini adalah kelompok masyarakat yang berumur diatas 60 (enam puluh) tahun, dengan demikian dapat di katakan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bukan disebabkan oleh merosotnya produksi pangan, namun lebih disebabkan oleh rendahnya daya beli mereka. Untuk itu Pemkab Pacitan

telah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp. 900 juta lebih guna memberikan subsidi terhadap kebutuhan masyarakat sangat miskin tersebut.

Sesuai hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan, jumlah rumah tangga miskin mencapai 48.619 RTM, naik dibanding hasil pendataan PPLS 2008 yang hanya 44.059 RTM. Database terpadu inilah yang selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menyusun program-program penanggulangan kemiskinan di Pacitan yaitu Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” yang salah satu terobosannya adalah memberikan beras miskin gratis kepada rumah tangga yang sangat miskin, yang dimana sedang diimplementasikan pada saat ini, sedangkan terobosan lain dari Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” yaitu bedah rumah untuk keluarga miskin dan pemberian alat-alat produksi kepada masyarakat masih belum dilaksanakan oleh Pemkab Pacitan.

Adanya Program Grindulu Mapan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat sangat miskin yang benar-benar tidak berdaya secara ekonomi, dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga sangat miskin (RTSM) yaitu dalam bentuk beras dan meningkatkan keberdayaan RTSM sehingga mampu memobilisasi potensi sosial yang dimiliki, mampu menolong dirinya sendiri, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Fakta tersebut masih banyak dijumpai, tidak hanya di kawasan pelosok tetapi juga pada Kecamatan Pacitan dalam hal ini sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga ini bertujuan

untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat sangat miskin yang tidak produktif.

Agar program ini lebih tepat sasaran Pemda bahkan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk melakukan validasi dan penyaluran program, tim tersebut dipimpin langsung oleh Bupati dengan beranggotakan pejabat sektoral, camat hingga kepala desa sebagai pemangku wilayah serta melibatkan LSM sehingga diharapkan pendataan bisa lebih akurat. Jumlah rumah tangga sangat miskin di Pacitan yang berhak mendapatkan Subsidi dari program Grindulu Mapan sebanyak 6.936 RTSM dan masih akan terus divalidasi kembali dengan mengacu pada hasil PPLS 2011. Guna menentukan keluarga sasaran telah diterbitkan Peraturan Bupati Pacitan nomor 13 tahun 2011 tentang indikator keluarga miskin di Pacitan. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan yang ditentukan dalam 14 Variabel. (<http://www.pacitankab.go.id>)

Kecamatan Pacitan tercatat 267 Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima beras gratis yang disalurkan pemerintah Kabupaten Pacitan melalui program Grindulu Mapan. Untuk itu diperlukan terimplementasinya program beras gratis tersebut secara baik guna membantu kehidupan masyarakat sangat miskin di Kecamatan Pacitan. (sumber : Pemkab Pacitan)

Desentralisasi implementasi kebijakan menuntut adanya diskresi, yaitu ruang gerak pada individu pelaksana (implementor) di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas kewenangannya apabila menghadapi

situasi khusus, misalnya apabila kebijakan tidak mengatur atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena kebijakan adalah mati dan masyarakat adalah hidup, sehingga dibutuhkan penyesuaian implementasi kebijakan di lapangan.

Bertitik tolak dengan uraian diatas, maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu : IMPLEMENTASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN “GRINDULU MAPAN” (Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” (Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan” (Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras Kemiskinan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberi gambaran tentang Implementasi Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan “Grindulu Mapan”

(Studi Kasus “Grindulu Mapan” Kebutuhan Beras di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan).

2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan khususnya Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bagi almmater dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kajian masalah kemiskinan.